

PERTAMBANGAN EMAS DI WILAYAH MALUKU BARAT DAYA: KUTUKAN ATAU BERKAH? (Studi Kasus Konflik Akses Sumber Agraria)

Gold Mining in Southwest Maluku: Curse or Blessing? (Study on Conflict Access of Agrarian Resources)

Yamres Pakniany^{*)}, Endriatmo Soetarto, dan Soeryo Adiwibowo

Program Studi Sosiologi Pedesaan, Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat,
Fakultas Ekologi Manusia, Sekolah Pasca Sarjana IPB

^{*)}E-mail: ypakniany@gmail.com

ABSTRACT

Conflict in agrarian resource-rich areas due to differences of interest continue to occur in Indonesia, including in the gold mining area of Hila Village, District of Romang Islands, Southwest Maluku Regency. Conflict that occurred in the gold mining area of Hila Village is a horizontal conflict involving the communities, but there are local elites who play a role in it as well. Conflicting communities are those who are pro-mining and against it. Each actor has a different interest in the resources of Hila Village. This research uses qualitative method with case study approach. The purpose of this study is to analyze the factors that cause conflict. The result shows that there are many factors causing the conflict, including access to land, compensation fee and labor recruitment. These factors occur due to unilateral claims and ineffective management by village and company authorities. The benefits of the management and utilization are only felt by certain actors who have access to resources, whereas other actors who do not have access do not benefit.

Keywords: Agrarian resources, conflict, Southwest Maluku

ABSTRAK

Konflik di daerah kaya sumberdaya agraria, akibat perbedaan kepentingan terus terjadi di Indonesia, termasuk di kawasan pertambangan emas Desa Hila, Kecamatan Kepulauan Romang, Kabupaten Maluku Barat Daya. Konflik yang terjadi di kawasan pertambangan emas Desa Hila adalah konflik horisontal yang melibatkan masyarakat dengan masyarakat, namun di dalamnya terdapat elit-elit lokal yang turut berperan. Masyarakat yang berkonflik adalah masyarakat yang pro terhadap tambang dengan masyarakat yang kontra terhadap tambang. Masing-masing aktor memiliki kepentingan yang berbeda terhadap sumberdaya di Desa Hila. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis faktor-faktor penyebab konflik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat banyak faktor yang menyebabkan terjadinya konflik, diantaranya faktor akses terhadap lahan, biaya kompensasi, dan perekrutan tenaga kerja. Faktor-faktor ini terjadi, karena klaim sepihak dan pengelolaan yang tidak efektif dilakukan oleh pemerintah desa dan perusahaan. Manfaat dari pengelolaan dan pemanfaatan tersebut, hanya dirasakan oleh aktor-aktor tertentu yang memiliki akses terhadap sumberdaya, sedangkan aktor-aktor lain tidak mendapatkan manfaat.

Kata kunci: Sumberdaya agraria, konflik, Maluku Barat Daya

PENDAHULUAN

Sumberdaya alam, termasuk lahan merupakan pemberian Tuhan Yang Maha Kuasa kepada manusia. Sebagai manusia yang diciptakan dan dilengkapi dengan akal budi, manusia diberikan tanggungjawab untuk mengelolah dan mengusahakan tanah bagi kelangsungan hidupnya. Manusia sebagai mandataris sumberdaya dituntut untuk mengelolah dan mengusahakan alam secara baik dan benar. Konsep mengelolah dan mengusahakan, mengikhtikarkan bahwa alam harus dimanfaatkan untuk kelangsungan hidup masyarakat, sehingga tidak terjadi ketimpangan dalam masyarakat yang kemudian dapat melahirkan klaim kepemilikan dan konflik. Berkaitan dengan itu, maka terdapat aturan-aturan yang menjadi dasar dalam mengatur prosesnya, baik aturan yang terdapat dalam kitab keagamaan, maupun aturan-aturan yang diputuskan bersama oleh manusia, seperti undang-undang.

Undang-Undang adalah dasar berpijaknya negara yang secara jelas telah mengatur dan menjaga posisi masyarakat sebagai elemen penting yang terintegrasi dalam pengelolaan dan

pemanfaatan suatu sumberdaya. Tetapi, realita dilapangan menunjukkan minimnya peran negara dalam menegakkan amanat-amanat konstitusi yang ada. Inilah yang mengakibatkan terjadinya konflik. Annisa, *et al* (2009) mengemukakan bahwa aturan-aturan atau kebijakan-kebijakan mengenai pengelolaan suatu sumberdaya tidak memperhatikan aspek sosial, dan ekonomi masyarakat, akibatnya banyak menimbulkan masalah-masalah baru, seperti klaim kepemilikan lahan dan akses terhadap lahan. Hal ini disebabkan, masing-masing pihak memiliki kepentingan, keinginan dan prioritas yang berbeda terhadap suatu sumberdaya.

Pengelolaan dan pemanfaatan SDA yang serasi, seimbang dan berbasis pada masyarakat sangatlah diperlukan guna mensejahterakan masyarakat dengan memperhatikan konteks lokal masyarakat setempat. Konteks lokal yang dimaksudkan adalah konteks sosial, budaya dan sumber-sumber ekonomi masyarakat, seperti lahan. Pengelolaan lahan dan sumberdaya lainnya, yang tidak berbasis pada masyarakat demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat, akan melahirkan kesenjangan dan ketimpangan bahkan konflik dalam masyarakat. Selain itu,